

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ilyas,Wiryawan dan Burton, Richard, 2008, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.

Soemitro,Hanitijo Ronny, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Komariah, Rukiah dan Purwito, Ali, 2006, *Pengadilan Pajak (Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai)*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nugraha, Safri, 2005, “*Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly, 2007, “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*”, Jakarta : PT Bhiana Ilmu Populer.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Syofyan, Syofrin dan Hidayat, Asyhar, 2004, ”*Hukum Pajak dan Permasalahannya*”, Bandung : Refika Aditama.

H.R, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.

Mahfud MD, Moh., 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta :Penerbit Renaka Cipta.

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia* ,Yogyakarta : UII Press

Sugiharti, Dewi Kania, SH.,MH, 2005, *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Buana, Hadi, 2012, *Peradilan Pajak Sebagai Sistem Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia* , Jakarta :IND HILL CO.

Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* , Yogyakarta: Liberty

Nusantara, Abdul Hakim dan Yasabari, Nasroen , 1980, *Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi (Pengantar Editor) dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni.

Brotodihardjo, R. Santoso, 1998, *Pengantar Ilmu hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghilia Indonesia.

Asmara, Galang, 2006, *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Makalah dan Artikel

Abroni Nasution, mewakili Dirjen Pajak, “Peradilan Pajak Indonesia”, Makalah disampaikan Diskusi Panel yang diseleggarakan oleh Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter (PPFM), Jakarta, tanggal 13 Desember 1993. Dalam Majalah *Kajian Fiskal dan Moneter*, No 14/X/1994, Bina Rena Pariwara, Jakarta, Oktober 1994.

Syofrin Syofyan, BPSP sebagai Badan Peradilan Pajak (BPP) Merupakan Peradilan Administrasi Murni”, artikel dalam *Jurnal Perpajakan Indonesia (JPI)*, Vol. 2, No. 5, Desember 2002, Jakarta.

Muchsin, Reformasi Pengadilan Pajak, artikel dalam Jurnal Varia Peradilan No.294, Mei 2010, Jakarta.

Undang – undang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157)

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak*.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27)

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 85)

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129)

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)

Sumber Lain

MaPPI FHUI, 2014, dalam artikel *Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak* ,
<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=205&tipe=kolom> (Diakses pada 11 April 2014)

Hukum Online,2014,dalam artikel *Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan Pajak* Belum Berjalan <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117&cl=Berita>, (Diakses 13 April 2015)

Sekretariat Pengadilan Pajak, 2014, *Visi dan Misi Pengadilan Pajak*, <http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/profile.asp>, (Diakses tanggal 27 Januari 2016)